

LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2021



BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena dengan ridhoNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini dapat diselesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini merupakan rangkuman dari kegiatan-kegiatan yang dilaporkan dan terkompilasi dari beberapa bidang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini berisi informasi mengenai aktivitas dan segala sesuatu yang telah dicapai Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021. Diharapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini dapat dijadikan bahan acuan bagi peningkatan mutu pelayanan dan pengembangan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang di masa mendatang.

Pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam kegiatan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mencapai target kinerjanya.

Kami menyadari bahwa isi dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini masih belum sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan, sehingga akan lebih sempurna di masa mendatang.

Akhirnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun Anggaran 2021 ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang tinggi. Semoga amal kebaikan diterima oleh Allah SWT.

Pangkajene Sidenreng, Januari 2021

Pt. KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG



MUH. YUSUF, SH., M.Kn

Pangkat : Pembina

Nip. 19820101 201101 1 006



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I : PENDAHULUAN

| | |
|--|---|
| A. Gambaran Umum Organisasi | 1 |
| B. Isu-Issu/Permasalahan Strategis | 6 |

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

| | |
|--|---|
| A. Perjanjian Kinerja Tahun 2021 | 9 |
| B. Indikator Kinerja Utama | 9 |

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

| | |
|--------------------------------|----|
| A. Akuntabilitas Kinerja | 10 |
| B. Realisasi Anggaran | 17 |

BAB IV : PENUTUP

20

LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1. Susunan dan Struktur Organisasi

a. Struktur Organisasi

Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Sidenreng Rappang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintah daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

Adapun susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang adalah sebagai berikut :

- Sekretariat

Sekretariat terdiri dari 2 (Dua) Sub Bagian yaitu :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

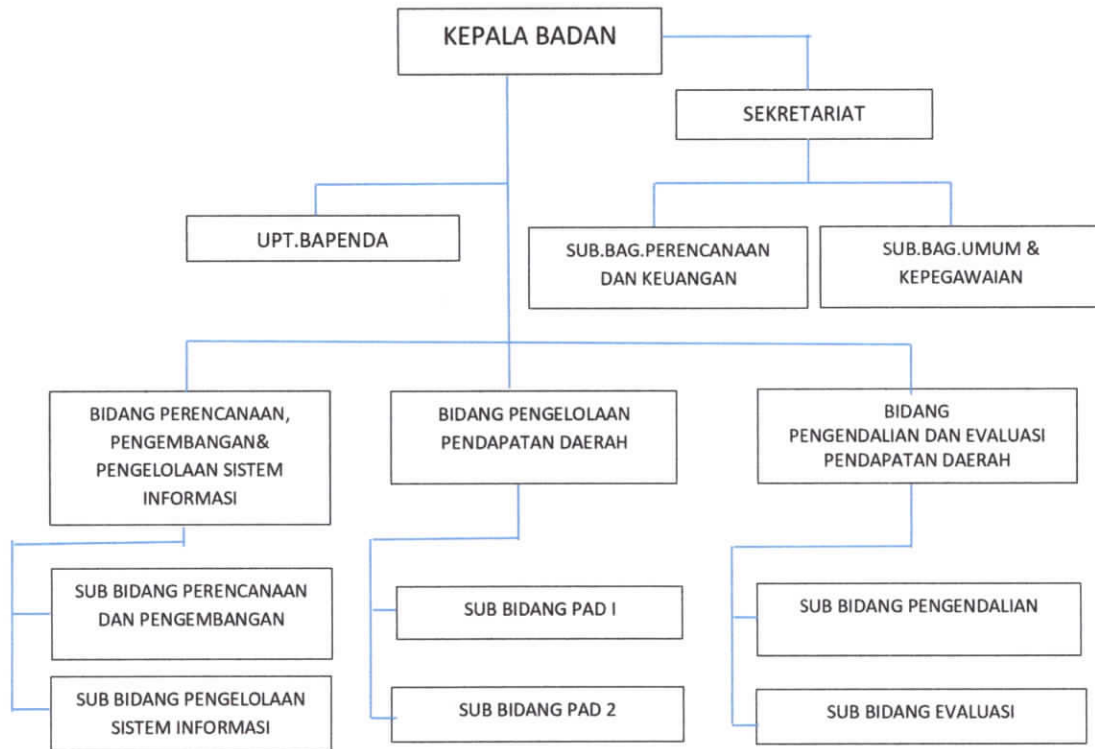


- Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi
Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
 - Sub Bidang Pengelolaan Sistem Informasi Pendapatan Daerah;
- Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah
Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah terdiri dari 2 (dua) Sub bidang yaitu:
 - Sub Bidang PAD 1;
 - Sub Bidang PAD 2;
- Bidang Pengendalian dan Evaluasi
Bidang Pengendalian dan Evaluasi terdiri dari 3 (tiga) Sub bidang yaitu :
 - Sub Bidang Pengendalian;
 - Sub Bidang Evaluasi;
- Unit Pelaksana Tehnis Badan
Susunan Organisasi Unit Pelaksanaan teknis Badan Pendapatan Daerah terdiri dari :
 - Kepala
 - Sub Bagian Tata UsahaUnit Pelaksana Tehnis Badan meliputi 11 (Sebelas) wilayah, yaitu :
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Maritengngae
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Tellu Limpoe
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Lautang
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Pulu
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Baranti
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Panca Rijang
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Kulo
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Watang Sidenreng
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Dua Pitue
 - Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riawa



- Unit Pelaksana Tehnis Bapenda kecamatan Pitu Riase

Adapun struktur organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sesuai dengan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dapat digambarkan dalam bagan sebagai berikut :



2. Tugas Pokok dan Fungsi

Adapun tugas pokok dan fungsi Bapenda berdasarkan Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019, tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang, yaitu : “Membantu Bupati dalam menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dibidang pendapatan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah”.



Untuk menjalankan tugas pokok yang dimaksud, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang mempunyai fungsi, yaitu :

- a. perumusan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- b. pelaksanaan kebijakan urusan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan dibidang perencanaan, pengembangan, pengendalian dan evaluasi, pengelolaan sistem informasi, dan pengelolaan pendapatan daerah;
- d. pelaksanaan administrasi Badan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

3. Sumber Daya

Untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sampai dengan bulan Desember 2020 mempunyai jumlah pegawai sebanyak 89 orang PNS dan 83 orang Non PNS

1. Berdasarkan pangkat dan golongan

a) PNS

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|----|--------------|-----------|
| 1 | IV | 4 |
| 2 | III | 53 |
| 3 | II | 29 |
| 4 | I | 2 |
| | TOTAL | 88 |

b) NON PNS

| NO | NON PNS | JUMLAH |
|----|------------------|-----------|
| 1 | Pramubakti | 79 |
| 2 | Cleaning Service | 3 |
| 3 | Penjaga Malam | 1 |
| | TOTAL | 83 |



2. Berdasarkan tingkat Pendidikan

a. PNS

| NO | GOLONGAN | JUMLAH |
|----|--------------|-----------|
| 1 | Magister | 8 |
| 2 | Sarjana | 54 |
| 3 | SMA | 24 |
| 4 | SMP | 2 |
| | TOTAL | 88 |

b. NON PNS

| NO | NON PNS | JUMLAH |
|----|--------------|-----------|
| 1 | Sarjana | 32 |
| 2 | SMA | 50 |
| 3 | SMP | 1 |
| | TOTAL | 83 |

4. Dasar Hukum

Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2020 disusun berdasarkan :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 47 Tahun 2019 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.



B. ISSU-ISSU / PERMASALAHAN STRATEGIS

Rencana strategis (Renstra) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2018-2023. Sebagai penerjemah kebijakan publik Bupati dan Wakil Bupati sebagai kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra menjadi pijakan bagi perencanaan strategis SKPD termasuk hingga ke level perencanaan tahunan. Berikut diuraikan visi misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD 2018-2023 yang dijabarkan ke dalam penyusunan Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2018-2023.

Visi : **“Terwujudnya Kabupaten Sidenreng Rappang Sebagai Daerah Agribisnis Yang Maju Dengan Masyarakat Religius, Aman, Adil Dan Sejahtera”**, dengan misi sebagai berikut :

1. Misi 1 : Memajukan dan meningkatkan kinerja kesehatan dan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas hidup masyarakat.
2. Misi 2 : Memajukan usaha agribisnis, UMKM dan industry pengolahan berbasis petik, olah, kemas dan jual.
3. Misi 3 : Mengembangkan kerjasama investasi daerah dan peneyediaan lapangan kerja baru.
4. Misi 4 : Mengembangkan dan meningkatkan pembangunan insfrastruktur wilayah dalam memperlancar mobilitas arus barang dan jasa.
5. Misi 5 : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic govermance.
6. Misi 6 : Mengembangkan dan memajukan kawasan pedesaan melalui konsep desa cerdas (smart village), sehat dan mandiri.
7. Misi 7 : Memajukan dan menciptakan kondisi kehidupan beragama serta meningkatkan kualitas budaya local sebagai bagis nilai dalam menciptakan kehidupan social kemasyarakatan yang kondusif.

Misi yang berkenaan dengan tugas pokok dan fungsi Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tercantum pada misi 5 yaitu : Mengoptimalkan kinerja, kualitas dan profesionalisme birokrasi pemerintah daerah



dalam pelayanan public melalui penerapan good governance dan electronic governance.

Untuk mencapai misi tersebut diperlukan perencanaan strategis selama 5 tahun kedepan. Rencana strtegis dan target kinerja dalam 5 tahun terakhir dijabarkan dalam tabel berikut :

Tabel I.1
Rencana Strategis Badan Pendapatan Daerah Kab. Sidrap

| No. | Tujuan | Sasaran | Indikator Tujuan / Sasaran | Target Kinerja Tujuan / Sasaran Pada Tahun Ke | | | | |
|-----|---|--|--|---|------|-------|-------|-------|
| | | | | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
| 1 | Meningkatkan penerimaan keuangan daerah | | Persentase tercapainya penerimaan pajak dan retribusi daerah | - | 85 | - | - | - |
| | | Meningkatnya penerimaan pajak & retribusi daerah | Persentase tercapainya PAD I | - | 85 | - | - | - |
| | | | Persentase tercapainya PAD II | - | 85 | - | - | - |
| 2 | Meningkatkan penerimaan PAD | | Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda | - | - | 12.40 | 13.89 | 15.55 |
| | | Meningkatnya Penerimaan PAD | Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | - | - | 27.93 | 27.06 | 29.15 |
| | | | Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | - | - | 4.26 | 3.59 | 3.36 |



1. Tujuan dan Sasaran

Mengacu pada visi misi yang telah ditetapkan, maka Badan Pendapatan Daerah menyusun tujuan yang hendak dicapai, yaitu : “Meningkatkan penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)”, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.2
Tujuan & Indikator Tujuan Kinerja

| TUJUAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-----------------------------|--|--------|--------------|----------------------|
| Meningkatkan penerimaan PAD | Persentase pertumbuhan pendapatan daerah yang dikelola Bapenda | % | - | 15,55 |

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang ingin dicapai atau dihasilkan adalah : Meningkatnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah, dengan indikator dan target kinerja sebagai berikut :

Tabel 1.3
Sasaran & Indikator Kinerja Sasaran

| SASARAN | INDIKATOR | SATUAN | KONDISI AWAL | TARGET AKHIR RENSTRA |
|-----------------------------|--|--------|--------------|----------------------|
| Meningkatnya Penerimaan PAD | - Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | % | - | 29,15 |
| | - Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | % | - | 3,36 |

2. Program untuk pencapaian sasaran

Berdasarkan Tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam renstra, maka upaya pencapaiannya kemudian dijabarkan secara lebih sistematis melalui perumusan program. Adapun program yang mendukung pencapaian sasaran tahun 2021 yaitu:

Tabel 1.4
Program untuk Pencapaian Sasaran Tahun 2021

| SASARAN | PROGRAM |
|-----------------------------|---------------------------------------|
| Meningkatnya Penerimaan PAD | Program pengelolaan pendapatan daerah |



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021

Perjanjian kinerja merupakan dokumen perencanaan / kesepakatan antara atasan dan bawahan untuk mencapai target kinerja yang ditetapkan satu instansi. Dokumen ini memuat sasaran strategis, indikator kinerja dan target kinerja beserta program dan anggaran. Penyusunan perjanjian kinerja tahun 2021 dilakukan dengan mengacu pada perubahan Renstra tahun 2018 – 2023.

Tabel II.1

Perjanjian Kinerja Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

| SASARAN | INDIKATOR | TARGET TAHUN 2021 |
|-----------------------------|--|-------------------|
| Meningkatnya Penerimaan PAD | - Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | 27.93 |
| | - Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | 4.26 |

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan IKU sebagai berikut :

Tabel II.2

Indikator Kinerja Utama Badan Pendapatan Daerah Tahun 2021

| Sasaran Strategis | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Pengukuran |
|-----------------------------|---|---|
| Meningkatnya penerimaan PAD | - Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | - $\frac{\text{Realisasi Pajak Daerah}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$ |
| | - Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | - $\frac{\text{Realisasi Retribusi Daerah (Pasar)}}{\text{Realisasi PAD}} \times 100\%$ |



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

A. AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara review atas laporan kinerja instansi pemerintah. Dimana capaian kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dan program yang telah ditetapkan dalam sasaran strategis sesuai dengan perubahan Renstra Badan Pendapatan Daerah Tahun 2018 – 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program / kegiatan, baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada tahun 2021.

Untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja, maka dalam laporan kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 akan dijelaskan capaian indikator kinerja utama (IKU) yang mendukung pencapaian kinerja sasaran dalam Renstra Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang. Pencapaian kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang digambarkan sebagai berikut :



Tabel III.1
Pencapaian Kinerja IKU Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang

| INDIKATOR KINERJA UTAMA | SATUAN | TARGET TAHUN 2021 | REALISASI |
|---|--------|-------------------|-----------|
| - Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | % | 27.93 | 33.52 |
| - Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | % | 4.26 | 4.70 |

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang mendukung sasaran strategis dalam Renstra OPD Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2018-2023. Nilai capaian atas pengukuran kinerja dapat dikategorikan dan diinterpestasikan sebagai berikut :

Tabel III.2
Skala Nilai Peringkat Kinerja Berdasarkan Permendagri Nomor 53 Tahun 2014

| No. | Interval Nilai Realisasi Kinerja | Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja |
|-----|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1 | 91% ≤ | Sangat Tinggi |
| 2 | 76% s.d 90% | Tinggi |
| 3 | 66% s.d 75% | Sedang |
| 4 | 51% s.d 65% | Rendah |
| 5 | 50% | Sangat Rendah |

Dari IKU diatas, menunjukkan bahwa indikator telah memenuhi kriteria "Sangat Tinggi".

1. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun ini

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Pencapaian indicator tahun 2021 secara ringkas ditunjukkan oleh tabel berikut :



Tabel III.3
Perbandingan antara target dan realialisasi

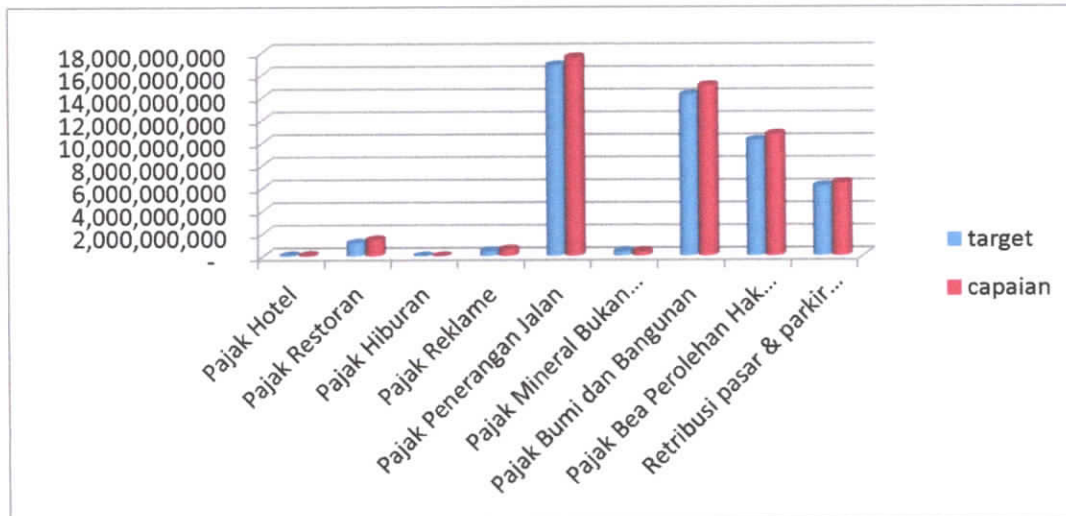
| No | Sasaran | Indikator Sasaran | Target 2021 (%) | Realisasi 2021 (%) | Capaian 2021 (%) | Ket |
|----|-----------------------------|---|-----------------|--------------------|------------------|-----|
| 1 | Meningkatnya penerimaan PAD | Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | 27.93 | 33.52 | 120 | |
| 2 | | Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | 4.26 | 4.70 | 110 | |

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa capaian 2021 sebesar 120% dan 110% yang berarti telah mencapai target atau telah memenuhi kriteria penilaian realisasi kinerja yaitu sangat tinggi. Dimana realisasi pajak daerah sebesar 46.063.400.879, retribusi pasar sebesar 6.428.854.317 dan PAD sebesar 136.774.390.757,39

Capaian tersebut terdiri dari pencapaian PAD I (pajak daerah) sebesar 105.65%, dimana realisasi pajak daerah ini terdiri dari pajak hotel sebesar 119.98%, pajak restoran sebesar 124.54%, pajak hiburan sebesar 100.05%, pajak reklame sebesar 130.74%, pajak penerangan jalan sebesar 103.98%, pajak mineral bukan logam & batuan sebesar 96.16%, pajak bumi dan bangunan sebesar 105.78, BPHTB sebesar 105.25%. Sedangkan capaian PAD II (retribusi daerah) sebesar 104.26%, yang terdiri dari retribusi pasar sebesar 104.31% dan retribusi tempat khusus parkir pasar sebesar 101.69 berikut dapat dilihat dalam bentuk grafik pencapaian penerimaan pajak & retribusi daerah



Grafik III.1
Capaian penerimaan Pajak Daerah & Retribusi Daerah
Tahun 2021



2. Perbandingan antara realisasi kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Apabila disandingkan dengan realisasi pendapatan pajak daerah pada tahun 2019, 2020 dapat dilihat pada tabel berikut :

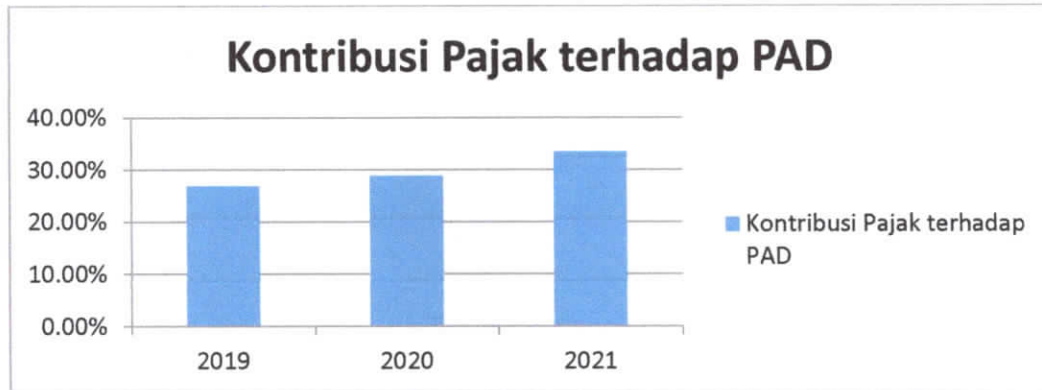
Tabel III.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2019 - 2021

| INDIKATOR KINERJA | REALISASI | | |
|---|-----------|--------|--------|
| | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | 26.90 % | 28.93% | 33.52% |
| Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | 5.15% | 4.53% | 4.70% |

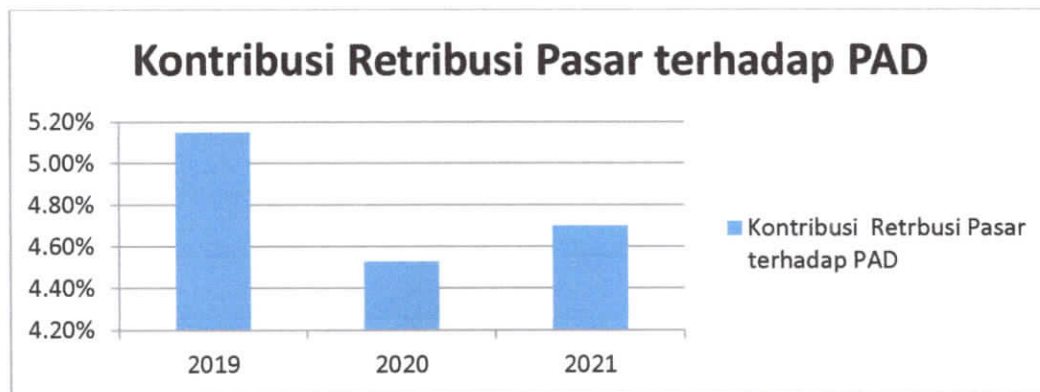
Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kontribusi pajak daerah pada setiap tahunnya mengalami peningkatan sebesar 2% dari tahun 2019-2020, dan sebesar 4% dari tahun 2020-2021. Sedangkan untuk retribusi pasar pada tahun 2019-2020 mengalami penurunan sebesar 0.62% tetapi mengalami kenaikan Kembali d tahun 2020-2021 sebesar 0.17%.



Grafik III.2
Kontribusi Pajak Daerah terhadap PAD Tahun 2019 – 2021



Grafik III.3
Kontribusi Retribusi Pasar terhadap PAD Tahun 2019 – 2021



3. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Tabel III.5
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2021 dengan Target Jangka Menengah

| INDIKATOR KINERJA | SATUAN | REALISASI TAHUN 2021 | TARGET JANGKA MENENGAH |
|---|--------|----------------------|------------------------|
| Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | % | 33,52% | 27,93 |
| Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | % | 4,70% | 4,26 |



4. Analisis Penyebab Keberhasilan / Kegagalan atau Peningkatan / Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

- a) Penyebab keberhasilan
 - a. Adanya bantuan KPK-RI bersama dengan tim korusupgah wilayah Sulawesi selatan terkait interpersi beberapa pajak daerah yaitu dengan terpasangnya alat M-Pos yang memudahkan dalam mengontrol omset wajib pajak
 - b. Penagihan pajak yang dilakukan secara intens serta penindakan tegas terhadap wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajibannya.
 - c. Adanya kebijakan dengan tidak diterbitkannya izin hiburan jika tidak mendapatkan verifikasi karcis pada Bapenda
 - d. Adanya pungutan terhadap pihak ketiga dalam hal ini penarikan pajak tambang gal.c pada setiap rekanan yang melaksanakan pembangunan di Kab.Sidrap
- b) Upaya-upaya dalam mempertahankan pencapaian
 - a. Dengan membuat aturan atau kebijakan yang dapat mendukung pencapaian target
 - b. Dengan melakukan sosialisasi-sosialisasi atas aturan atau kebijakan yang sudah dibuat
 - c. Dengan melakukan penagihan secara lebih intens

5. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Program yang digunakan dalam pencapaian sasaran adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dan Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar. Anggaran yang ditetapkan untuk Program Pengelolaan Pendapatan Daerah sebesar Rp. 5.673.081.000, dan anggaran untuk Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota khusus untuk kegiatan retribusi pasar sebesar 367.953.000. Dari anggaran tersebut terealisasi sebesar Rp. 4.494.409.867 atau sebanyak 79.22%, dan 329.593.000 atau sebanyak 89.57%. jadi total anggaran



yang disediakan untuk pencapaian sasaran strategis adalah sebanyak 6.041.034.000 dan terealisasi sebanyak 4.824.002.867 atau sebanyak 79,85%.

Tabel III.6
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

| SASARAN | INDIKATOR | % CAPAIAN KINERJA (>100%) | % PENYERAPAN ANGGARAN |
|-----------------------------|---|---------------------------|-----------------------|
| Meningkatnya penerimaan PAD | Persentase Kontribusi pajak daerah terhadap PAD | 120% | 79,85% |
| | Persentase Kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD | 110% | |

6. Analisis Program / Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja.

Program / kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian sasaran "Meningkatnya penerimaan PAD" adalah Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu kegiatan Program Pengelolaan Pendapatan Daerah. Serta Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota, dengan 1 (satu) kegiatan yaitu Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah. Berikut disajikan program, kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran.



Tabel III.7
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Mendukung Pencapaian Sasaran

| PROGRAM | KEGIATAN | SUB KEGIATAN |
|---|--|--|
| Pengelolaan Pendapatan Daerah | Pengelolaan Pendapatan Daerah | Perencanaan pengelolaan pajak daerah |
| | | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |
| | | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah |
| | | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah |
| | | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah |
| | | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah |
| | | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |
| | | Penetapan Wajib Pajak Daerah |
| | | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah |
| | | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah |
| | | Penagihan Pajak Daerah |
| | | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah |
| | | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah |
| Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah |
| | | Pengolahan Data Retribusi Daerah |
| | | Penetapan Wajib Retribusi Daerah |
| | | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah |

B. REALISASI ANGGARAN

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang pada tahun anggaran 2021 mengelola anggaran sebesar 19.451.443.000 yang terdiri dari belanja operasi serta belanja modal dan terealisasi sebesar Rp. 16.850.509.522,- dengan rincian sebagai berikut :

Tabel III.8
Realisasi Belanja Tahun 2021

| No. | Jenis Belanja | Anggaran | Realisasi | % | Sisa Anggaran |
|-----|----------------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
| 1 | BELANJA OPERASI | 19.032.627.800 | 16.444.055.386 | 86,40 | 2.588.572.414 |
| | <i>Belanja pegawai</i> | <i>10.658.506.000</i> | <i>9.411.742.170</i> | <i>88,30</i> | <i>1.246.763.830</i> |
| | <i>Belanja barang & jasa</i> | <i>8.374.121.800</i> | <i>7.032.313.216</i> | <i>83,98</i> | <i>1.341.808.584</i> |
| 2 | BELANJA MODAL | 418.815.200 | 406.454.136 | 97,05 | 12.361.064 |
| | Jumlah belanja | 19.451.443.000 | 16.850.509.522 | 86,63 | 2.600.933.478 |

Anggaran belanja yang digunakan untuk mendukung / membiayai program dan kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang sebesar Rp. 6.041.034.000 dan terealisasi sebesar Rp. 4.824.002.867,- atau mencapai 79,85 %. pencapaian realisasi anggaran kegiatan dalam rangka mencapai sasaran strategis Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 digambarkan lebih rinci pada tabel berikut :

Tabel III.9
Tabel Realisasi Anggaran Program, Kegiatan & Sub. Kegiatan Tahun 2021

| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|-----|--|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| I | Pengelolaan Pendapatan Daerah | 5,673,081,000 | 4,494,409,867 | 79.22 |
| I.1 | <i>Pendapatan Daerah</i> | <i>5,673,081,000</i> | <i>4,494,409,867</i> | <i>79.22</i> |
| 1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | 59,799,000 | 59,543,150 | 99.57 |
| 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 205,987,000 | 205,049,428 | 99.54 |
| 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 100,988,000 | 100,882,200 | 99.90 |
| 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 167,900,000 | 166,292,800 | 99.04 |
| 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 20,859,000 | 19,641,000 | 94.16 |
| 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 136,369,000 | 134,183,000 | 98.40 |
| 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4,358,178,000 | 3,188,587,983 | 73.16 |



| NO. | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp.) | REALISASI (Rp.) | % |
|--------------|---|----------------------|----------------------|--------------|
| 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 29,480,000 | 28,740,000 | 97.49 |
| 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 89,888,000 | 89,746,000 | 99.84 |
| 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 7,631,000 | 7,616,000 | 99.80 |
| 11 | Penagihan Pajak Daerah | 233,657,000 | 232,577,806 | 99.54 |
| 12 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah | 180,196,000 | 179,402,800 | 99.56 |
| 13 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah | 82,149,000 | 82,147,700 | 100.00 |
| II | Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota | 367,953,000 | 329,593,000 | 89.57 |
| II.1 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 367,953,000 | 329,593,000 | 89.57 |
| 1 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | 261,834,000 | 224,230,000 | 85.64 |
| 2 | Pengolahan Data Retribusi Daerah | 6,318,000 | 6,318,000 | 100.00 |
| 3 | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | 90,764,000 | 90,008,000 | 99.17 |
| 4 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 9,037,000 | 9,037,000 | 100.00 |
| TOTAL | | 6,041,034,000 | 4,824,002,867 | 79.85 |

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa serapan anggaran untuk pencapaian sasaran strategis hanya 79,85%, hal ini dikarenakan pada sub kegiatan Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) realisasinya hanya mencapai 73,16%. Hal tersebut dikarenakan adanya kesalahan perhitungan jumlah belanja operasional kolektor yang masuk dalam belanja jasa tenaga pelayanan umum. Dan untuk realisasi anggaran Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang secara keseluruhan yaitu sebesar 86,63% yang dapat dilihat pada tabel Laporan Realisasi Anggaran Belanja Badan Pendapatan Daerah tahun anggaran 2021 (terlampir).



BAB IV PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun 2021 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya. Sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang dalam mencapai tujuan/sasaran strategis tahun 2021.

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang menetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai sesuai dengan rencana strategis (Renstra) tahun 2018-2023, yaitu : meningkatkan penerimaan PAD dengan sasaran meningkatnya penerimaan PAD dengan indicator kinerja yaitu : kontribusi pajak daerah terhadap PAD dan kontribusi retribusi daerah (pasar) terhadap PAD.

Secara keseluruhan hasil evaluasi kinerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang telah memenuhi target. Tingkat capaian untuk indicator kinerja yang telah ditetapkan pada tahun 2021 secara total telah memenuhi target yang terdiri dari kontribusi pajak daerah terhadap PAD sebesar 33,51% dan kontribusi retribusi daerah (pasa) terhadap PAD sebesar 4,70%.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang tahun 2021 dapat laporkan dengan harapan ada umpan balik perbaikan dari semua pihak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----|---|-----------------------|-----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 19,451,443,000 | 16,850,509,522 | 86.63 |
| | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | 13,778,362,000 | 12,356,099,655 | 89.68 |
| 1 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 43,757,500 | 43,568,000 | 99.57 |
| | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 37,212,000 | 37,026,000 | 99.50 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 4,378,000 | 4,378,000 | 100.00 |
| | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 2,167,500 | 2,164,000 | 99.84 |
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | 10,700,369,000 | 9,453,059,170 | 88.34 |
| | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | 10,658,506,000 | 9,411,742,170 | 88.30 |
| | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN | 37,356,000 | 36,810,000 | 98.54 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD | 1,496,000 | 1,496,000 | 100.00 |
| | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 1,715,000 | 1,715,000 | 100.00 |
| | Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran | 1,296,000 | 1,296,000 | 100.00 |
| 3 | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah | 367,953,000 | 329,593,000 | 89.57 |
| | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah | 261,834,000 | 224,230,000 | 85.64 |
| | Pengolahan Data Retribusi Daerah | 6,318,000 | 6,318,000 | 100.00 |
| | Penetapan Wajib Retribusi Daerah | 90,764,000 | 90,008,000 | 99.17 |
| | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah | 9,037,000 | 9,037,000 | 100.00 |
| 4 | Administrasi Umum Perangkat Daerah | 559,059,500 | 541,841,550 | 96.92 |
| | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 19,625,000 | 19,625,000 | 100.00 |
| | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 13,000,000 | 12,901,500 | 99.24 |
| | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan | 147,426,000 | 136,706,000 | 92.73 |
| | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundangundangan | 2,928,000 | 720,000 | 24.59 |
| | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 376,080,500 | 371,889,050 | 98.89 |
| 5 | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | 418,815,200 | 406,454,136 | 97.05 |
| | Pengadaan Mebel | 42,828,000 | 42,080,000 | 98.25 |

| No. | PROGRAM/KEGIATAN | ANGGARAN | REALISASI | % |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 206,537,200 | 195,837,139 | 94.82 |
| | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 169,450,000 | 168,536,997 | 99.46 |
| 6 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 1,305,331,800 | 1,221,271,347 | 93.56 |
| | Penyediaan Jasa Surat Menyurat | 3,994,000 | 3,550,000 | 88.88 |
| | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 248,840,000 | 181,483,347 | 72.93 |
| | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 1,052,497,800 | 1,036,238,000 | 98.46 |
| 7 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | 383,076,000 | 360,312,452 | 94.06 |
| | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | 130,516,000 | 107,897,056 | 82.67 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 232,080,000 | 231,935,396 | 99.94 |
| | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 20,480,000 | 20,480,000 | 100.00 |
| II | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH | 5,673,081,000 | 4,494,409,867 | 79.22 |
| 1 | Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah | 5,673,081,000 | 4,494,409,867 | 79.22 |
| 1 | Perencanaan pengelolaan pajak daerah | 59,799,000 | 59,543,150 | 99.57 |
| 2 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah | 205,987,000 | 205,049,428 | 99.54 |
| 3 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah | 100,988,000 | 100,882,200 | 99.90 |
| 4 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah | 167,900,000 | 166,292,800 | 99.04 |
| 5 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah | 20,859,000 | 19,641,000 | 94.16 |
| 6 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah | 136,369,000 | 134,183,000 | 98.40 |
| 7 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) | 4,358,178,000 | 3,188,587,983 | 73.16 |
| 8 | Penetapan Wajib Pajak Daerah | 29,480,000 | 28,740,000 | 97.49 |
| 9 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah | 89,888,000 | 89,746,000 | 99.84 |
| 10 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah | 7,631,000 | 7,616,000 | 99.80 |

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO. | URAIAN | TARGET | REALISASI | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|---------------------------|---------------|
| | | | | Rp. | % |
| A | PENDAPATAN PAJAK DAERAH | 43,400,558,000.00 | 46,063,400,879.00 | (2,662,842,879.00) | 106.14 |
| 1 | Pajak Hotel | 65,000,000.00 | 77,985,000.00 | (12,985,000.00) | 119.98 |
| | Hotel | 65,000,000.00 | 77,985,000.00 | (12,985,000.00) | 119.98 |
| 2 | Pajak Restoran | 1,165,066,000.00 | 1,450,984,230.00 | (285,918,230.00) | 124.54 |
| | Warung dan sejenisnya | 628,081,000.00 | 582,764,423.00 | 45,316,577.00 | 92.78 |
| | Jasa boga/katering dan sejenisnya | 536,985,000.00 | 868,219,807.00 | (331,234,807.00) | 161.68 |
| 3 | Pajak Hiburan | 26,535,000.00 | 26,548,000.00 | (13,000.00) | 100.05 |
| | Diskotik, karaoke, klub malam dan sejenisnya | 5,500,000.00 | 5,348,000.00 | 152,000.00 | 97.24 |
| | Sirkus/akrobat/sulap | 17,535,000.00 | 11,990,000.00 | 5,545,000.00 | 68.38 |
| | Pacuan kuda, kendaraan bermotor, dan permainan ketangkasan | 3,500,000.00 | 9,210,000.00 | (5,710,000.00) | 263.14 |
| 4 | Pajak Reklame | 450,000,000.00 | 588,336,343.00 | (138,336,343.00) | 130.74 |
| | Reklame papan/Bilboard/vid | 450,000,000.00 | 588,336,343.00 | (138,336,343.00) | 130.74 |
| 5 | Pajak Penerangan Jalan | 16,870,468,000.00 | 17,542,099,879.00 | (671,631,879.00) | 103.98 |
| | Pajak Penerangan jalan di hasilkan sendiri | 16,870,468,000.00 | 17,542,099,879.00 | (671,631,879.00) | 103.98 |
| 6 | Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan | 400,000,000.00 | 384,620,403.00 | 15,379,597.00 | 96.16 |
| | Pasir dan kerikil | 3,400,000.00 | 69,573,574.00 | (66,173,574.00) | 2,046.28 |
| | Mineral bukan logam dan batuan lainnya | 396,600,000.00 | 315,046,829.00 | 81,553,171.00 | 79.44 |
| 7 | Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan | 14,223,489,000.00 | 15,257,552,110.00 | (1,034,063,110.00) | 107.27 |
| | PBB-P2 | 14,223,489,000.00 | 15,257,552,110.00 | (1,034,063,110.00) | 107.27 |
| 8 | Bea Perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) | 10,200,000,000.00 | 10,735,274,914.00 | (535,274,914.00) | 105.25 |
| | BPHTB pemindahan hak | 9,850,000,000.00 | 10,457,616,664.00 | (607,616,664.00) | 106.17 |
| | BPHTB pemberian hak baru | 350,000,000.00 | 277,658,250.00 | 72,341,750.00 | 79.33 |
| B | PENDAPATAN RETRIBUSI DAERAH | 6,166,346,500.00 | 6,428,854,317.00 | (262,507,817.00) | 104.26 |
| 1 | Retribusi Pelayanan Pasar | 6,034,346,500.00 | 6,294,617,317.00 | (260,270,817.00) | 104.31 |

| NO. | URAIAN | TARGET | REALISASI | BERTAMBAH / BERKURANG | |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|-------------------------|---------------|
| | | | | Rp. | % |
| | Retribusi Pelayanan Pasar - pelataran | 2,187,546,000.00 | 2,071,155,338.00 | 116,390,662.00 | 94.68 |
| | Retribusi Pelayanan Pasar - Los | 2,131,559,000.00 | 2,298,185,954.00 | (166,626,954.00) | 107.82 |
| | Retribusi Pelayanan Pasar - Kios | 1,715,241,500.00 | 1,925,276,025.00 | (210,034,525.00) | 112.25 |
| 2 | Retribusi Tempat khusus parkir | 132,000,000.00 | 134,237,000.00 | (2,237,000.00) | 101.69 |
| | Parkir pasar | 132,000,000.00 | 134,237,000.00 | (2,237,000.00) | 101.69 |
| C | LAIN-LAIN PAD YANG SAH | 150,000,000.00 | 63,286,749.00 | 86,713,251.00 | 42.19 |
| | Pendapatan denda atas pelanggaran peraturan daerah | 150,000,000.00 | 63,286,749.00 | 86,713,251.00 | 42.19 |
| D | HIBAH | 2,500,000,000.00 | - | 2,500,000,000.00 | - |
| | Sumbangan pihak ketiga | 2,500,000,000.00 | - | 2,500,000,000.00 | - |
| | TOTAL | 52,216,904,500.00 | 52,555,541,945.00 | (338,637,445.00) | 100.65 |

**LAPORAN REALISASI PENERIMAAN PENDAPATAN ASLI DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG
TAHUN ANGGARAN 2021**

| NO. | PENGELOLA PAD | TARGET | REALISASI | % |
|-----|---|---------------------------|---------------------------|--------------|
| 1 | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN | 10,000,000.00 | 8,550,000.00 | 85.50 |
| 2 | RSUD NENE MALLOMO | 42,500,000,000.00 | 37,764,600,051.00 | 88.86 |
| 3 | RSUD ARIFIN NUMANG | 27,500,000,000.00 | 23,364,261,757.00 | 84.96 |
| 4 | DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | 17,474,619,000.00 | 13,442,792,872.00 | 76.93 |
| 5 | DINAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR | 35,000,000.00 | 20,000,000.00 | 57.14 |
| 6 | DINAS BINA MARGA, CIPTA KARYA, TATA RUANG, PERTANAHAN, DAN PERUMAHAN RAKYAT | 2,700,000,000.00 | 735,679,662.00 | 27.25 |
| 7 | DINAS LINGKUNGAN HIDUP | 660,000,000.00 | 423,730,000.00 | 64.20 |
| 8 | DINAS PERHUBUNGAN | 870,000,000 | 408,995,000.00 | 47.01 |
| 9 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | 596,250,000.00 | 596,250,000.00 | 100.00 |
| 10 | DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN | 147,310,000.00 | 148,620,000.00 | 100.89 |
| 11 | DINAS PERDAGANGAN DAN PERINDUSTRIAN | 60,000,000.00 | 71,241,500.00 | 118.74 |
| 12 | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH | 15,650,000,000.00 | 6,524,965,543.83 | 41.69 |
| 13 | BADAN PENDAPATAN DAERAH | 49,716,904,500 | 52,555,541,945.00 | 105.71 |
| 14 | INSPEKTORAT | 1,714,000,000 | 709,162,426.56 | 41.37 |
| | TOTAL | 159,634,083,500.00 | 136,774,390,757.39 | 85.68 |